

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1. Profil Bank Umum Di Indonesia

Bank umum adalah lembaga keuangan yang berperan utama dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana dari masyarakat. Sebagai salah satu jenis bank berdasarkan fungsinya, bank umum beroperasi dengan cakupan yang luas dan menjadi jenis bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Per Januari 2025, jumlah bank umum yang beroperasi di Indonesia tercatat sebanyak 105 bank, mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya akibat tren konsolidasi di sektor perbankan. Pengurangan jumlah bank ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas sistem keuangan nasional, sejalan dengan kebijakan OJK dan BI. Bank umum yang beroperasi di Indonesia terdiri dari berbagai kategori, termasuk bank BUMN, bank swasta nasional, bank asing, dan BPD. Bank umum sering disebut sebagai bank komersial karena kegiatannya mencakup berbagai layanan perbankan yang berorientasi pada keuntungan. Berikut ini adalah daftar bank umum di Indonesia yang dikelompokkan berdasarkan kategori tersebut:

Tabel 4.1 Jumlah Bank Umum 2018-2024

NO.	Kelompok Bank	JUMLAH BANK						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bank Umum Konvensional - Bank Persero	4	4	4	4	4	4	4
2.	Bank Umum Konvensional - Bank Pembangunan Daerah	24	24	25	25	24	24	24
3.	Bank Umum Konvensional - Bank Swasta Nasional	60	60	58	58	58	57	57
4.	Bank Umum Konvensional - Kantor Cabang Bank Asing	8	8	8	8	7	7	7
5.	Bank Umum Syariah - Bank Pembangunan Daerah	2	2	2	2	3	3	3
6.	Bank Umum Syariah - Bank Swasta Nasional	12	12	12	10	10	10	10
	Jumlah Bank Umum	110	110	109	107	106	105	105

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Menurut Buku Seri Literasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank umum adalah bank yang beroperasi baik berdasarkan sistem konvensional maupun prinsip syariah. Dalam operasionalnya, bank ini menyediakan berbagai jasa keuangan yang mendukung lalu lintas pembayaran, termasuk simpanan, kredit, dan layanan transaksi keuangan lainnya.

Secara umum, bank umum memiliki tiga fungsi utama dalam sistem keuangan, yaitu:

1. Agent of Trust

Bank menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kepercayaan, baik dalam menghimpun dana dari nasabah maupun dalam menyalurkan kredit kepada debitur. Kepercayaan ini berkaitan dengan keamanan dana yang disimpan oleh masyarakat dan keyakinan bank terhadap kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman.

2. Agent of Development

Bank berperan dalam mendukung kelancaran transaksi ekonomi, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi. Dengan menyediakan alat pembayaran dan jasa keuangan, bank menjadi fasilitator utama dalam aktivitas ekonomi nasional.

3. Agent of Service

Selain menyediakan layanan keuangan, bank juga menawarkan berbagai jasa tambahan seperti transfer dana, penyimpanan dalam kotak pengamanan, serta jasa penagihan atau inkaso yang mempermudah transaksi keuangan masyarakat.

Berdasarkan cakupan operasionalnya, bank umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Bank Umum Devisa

Bank yang memperoleh lisensi untuk melakukan transaksi dalam mata uang asing sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Bank Umum Non-Devisa

Bank yang hanya melayani transaksi dalam negeri dan tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi dalam mata uang asing.

Peran bank umum dalam perekonomian sangat penting karena mereka

berfungsi sebagai penghubung yang menghubungkan pihak yang kelebihan dan adan pihak yang membutuhkan dana. Berikut adalah beberapa kontribusi utama bank umum dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi:

1. Intermediasi Keuangan

Bank sebagai penghubung yang menghubungkan pihak surplus dengan pihak yang membutuhkan modal melalui produk simpanan dan kredit, sehingga meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya keuangan.

2. Penyediaan Kredit dan Pembiayaan

Bank mendukung berbagai sektor ekonomi dengan memberikan kredit konsumsi maupun investasi, yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan peluang usaha.

3. Pengelolaan Risiko Keuangan

Bank menawarkan berbagai instrumen keuangan seperti asuransi dan reksa dana untuk membantu masyarakat dan perusahaan mengelola risiko ekonomi.

4. Penggerak Konsumsi dan Investasi

Dengan memberikan kredit, bank membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan investasi perusahaan, yang pada akhirnya menggerakkan roda perekonomian.

5. Penyedia Layanan Transaksi Keuangan

Bank berperan sebagai tempat penyimpanan uang yang aman serta menyediakan berbagai transaksi keuangan seperti transfer, pembayaran tagihan, dan lainnya yang mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari.

Sebagai pilar utama dalam sistem keuangan, bank umum memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan sektor riil. Dengan berbagai layanan yang ditawarkan, bank umum tidak hanya menjadi perantara keuangan tetapi juga penggerak utama dalam sistem ekonomi Indonesia.

4.2 Posisi Pinjaman/Kredit Rupiah Yang Diberikan Bank Umum

Dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan, bank memiliki peran strategis dalam menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan melalui berbagai jenis kredit. Penyaluran kredit ini dikategorikan berdasarkan tujuan penggunaannya, jangka waktu pengembalian, dan sektor ekonomi yang dibiayai.

Secara umum, terdapat tiga jenis utama kredit yang diberikan oleh sektor perbankan, yaitu kredit konsumsi, kredit investasi, dan kredit modal kerja.

Tabel 4.2 Posisi Pinjaman/Kredit Rupiah Yang Diberikan Bank Umum (Milliar Rupiah) 2018-2024

Tahun	Pinjaman Modal Kerja yang disetujui	Pinjaman Investasi yang disetujui	Pinjaman Konsumsi yang disetujui
2018	2.454.431	1.006.339	1.456.258
2019	2.505.766	1.156.880	1.556.502
2020	2.381.592	1.135.438	1.543.547
2021	2.527.664	1.172.255	1.615.593
2022	2.822.258	1.294.267	1.768.344
2023	3.122.976	1.439.166	1.930.046
2024	3.358.997	1.637.494	2.134.242

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Bank Indonesia

1. Kredit Konsumsi

Kredit konsumsi adalah salah satu jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, baik yang bersifat rutin maupun tidak rutin. Kredit ini digunakan untuk pembelian barang atau jasa, seperti pembelian rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kendaraan bermotor, peralatan elektronik, atau kebutuhan pribadi lainnya seperti biaya pendidikan dan kesehatan. Umumnya, kredit konsumsi memiliki jangka waktu yang bervariasi, mulai dari jangka pendek hingga menengah, tergantung pada jenis kebutuhan dan kemampuan pembayaran peminjam. Bank menawarkan fasilitas kredit konsumsi ini dengan skema cicilan yang disesuaikan dengan kemampuan finansial peminjam. Kredit konsumsi berperan penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membeli, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Selain itu, kredit konsumsi juga berfungsi untuk memperluas akses masyarakat terhadap barang dan layanan yang sebelumnya sulit dijangkau, khususnya bagi segmen pasar yang belum memiliki dana cukup untuk membeli barang mahal secara tunai. Namun, karena sifatnya yang berisiko lebih tinggi dibandingkan dengan kredit produktif, bank biasanya akan menerapkan syarat dan ketentuan yang lebih ketat, termasuk pemeriksaan kemampuan bayar dan jaminan tertentu.

2. Kredit Investasi

Kredit investasi ditujukan untuk mendanai berbagai proyek produktif dalam jangka panjang, yang melibatkan pembelian barang modal seperti mesin, peralatan, dan infrastruktur yang mendukung kegiatan usaha. Kredit ini banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan kapasitas produksi, memperluas usaha, atau membangun fasilitas baru. Sumber dana dari kredit investasi memungkinkan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi tanpa perlu mengeluarkan modal besar yang dapat mengganggu kelangsungan usaha. Biasanya, kredit investasi memiliki jangka waktu yang lebih panjang dan memerlukan agunan yang lebih besar, mengingat risiko yang lebih tinggi terkait dengan penggunaan dana untuk investasi jangka panjang.

3. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja berfungsi untuk pembiayaan operasional sehari-hari suatu usaha. Kredit ini digunakan untuk menutupi biaya rutin yang diperlukan dalam menjalankan bisnis, seperti pembelian bahan baku, biaya gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya. Kredit modal kerja seringkali bersifat jangka pendek dan diberikan dengan tujuan untuk membantu perusahaan menjaga kelancaran arus kas dan memastikan operasi usaha tetap berjalan lancar. Bank memberikan kredit modal kerja kepada pelaku usaha yang membutuhkan tambahan likuiditas untuk mendukung kegiatan produksi atau distribusi barang dan jasa. Karena sifatnya yang lebih fleksibel dan berjangka waktu singkat, kredit modal kerja biasanya memiliki persyaratan yang lebih ringan dibandingkan kredit investasi, meskipun tetap memerlukan analisis kelayakan usaha dan kemampuan bayar yang memadai.

4.3 Perekonomian Indonesia Tahun 2018-2024

Tahun 2018 mencerminkan masa konsolidasi bagi perekonomian Indonesia, yang berada dalam fase pemulihan dan penguatan setelah tekanan global pada tahun-tahun sebelumnya. Di tengah kondisi ekonomi dunia yang relatif stabil namun tetap dibayangi oleh potensi normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju, Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi yang solid. Permintaan domestik yang meningkat, terutama dari sisi konsumsi rumah

tangga dan belanja pemerintah, turut menopang laju pertumbuhan. Investasi juga menunjukkan perbaikan seiring meningkatnya keyakinan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi nasional. Stabilitas makroekonomi tetap terjaga dengan inflasi yang rendah dan nilai tukar yang relatif terkendali meski sempat tertekan oleh arus keluar modal asing. Di sisi lain, sektor industri manufaktur dan konstruksi mengalami penguatan sejalan dengan proyek infrastruktur pemerintah yang masih terus berjalan. Tahun 2018 juga menjadi periode awal konsolidasi fiskal dan persiapan menuju tahun politik, yang turut memengaruhi arah kebijakan dan aktivitas ekonomi nasional secara keseluruhan.

Tahun 2019 menjadi masa yang krusial bagi perekonomian Indonesia. Di tengah melambatnya perekonomian global yang dipicu oleh berbagai ketidakpastian, seperti tensi dagang antara negara-negara besar, dinamika geopolitik, serta gejolak di beberapa kawasan dunia, Indonesia turut merasakan dampaknya. Pertumbuhan ekonomi nasional mengalami pelemahan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari dalam negeri, tekanan muncul dari melemahnya kinerja ekspor dan investasi, serta penurunan produktivitas pada beberapa sektor utama seperti industri dan pertambangan. Meski demikian, perekonomian Indonesia tetap mampu bertahan berkat dukungan kuat dari konsumsi domestik yang stabil serta terjaganya tingkat inflasi. Sektor-sektor jasa tertentu bahkan menunjukkan penguatan, mencerminkan adanya pergeseran aktivitas ekonomi yang mulai mengarah pada sektor tersier. Momentum politik nasional, seperti pemilihan umum, juga memberikan dorongan tersendiri terhadap aktivitas ekonomi. Di tengah kondisi yang penuh tekanan tersebut, Indonesia tetap mencatatkan kemajuan dari sisi kesejahteraan, dengan peningkatan daya beli masyarakat dan pergeseran status ekonomi nasional di tingkat global. Hal ini menjadi penanda bahwa meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, fondasi ekonomi Indonesia masih cukup kokoh untuk terus melangkah maju.

Tahun 2020 menjadi masa paling menantang dalam sejarah modern, ketika pandemi Covid-19 melanda dan mengguncang hampir seluruh sendi kehidupan, termasuk di Indonesia. Wabah ini tidak hanya menghadirkan krisis kesehatan

yang sangat serius, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang luas dan mendalam. Aktivitas masyarakat terganggu, banyak usaha terpaksa menghentikan operasionalnya, dan lapangan pekerjaan mengalami tekanan hebat. Situasi ini mengakibatkan penurunan kesejahteraan masyarakat secara signifikan, terutama karena menurunnya pendapatan dan hilangnya pekerjaan. Perekonomian nasional pun terpukul cukup keras, mengalami tekanan berat akibat menurunnya permintaan dari dalam dan luar negeri serta terganggunya aktivitas produksi. Kebijakan pembatasan sosial yang diberlakukan untuk menekan penyebaran virus, meskipun penting dari sisi kesehatan, secara langsung berdampak pada sektor-sektor ekonomi utama. Meskipun demikian, terdapat beberapa sektor yang tetap mampu bertahan, bahkan tumbuh, di tengah keterbatasan yang ada. Pemerintah pun merespons dengan berbagai langkah strategis, termasuk peluncuran program pemulihan ekonomi nasional sebagai upaya untuk menahan dampak lebih dalam dan mempercepat proses pemulihan.

Setelah mengalami tekanan hebat akibat pandemi, perekonomian Indonesia mulai bangkit kembali pada tahun 2021. Perbaikan ini didorong oleh keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 serta penerapan berbagai program pemulihan ekonomi. Aktivitas masyarakat dan dunia usaha mulai bergerak, terutama di wilayah-wilayah yang didukung oleh sektor industri pengolahan. Beberapa daerah mencatatkan kemajuan signifikan berkat pengembangan industri berbasis sumber daya alam. Namun, pemulihan ini tidak berlangsung merata. Masih terdapat wilayah yang mengalami kontraksi akibat pembatasan akses masuk dan menurunnya kunjungan wisatawan, sehingga sektor pariwisata, perhotelan, dan restoran belum mampu pulih sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perekonomian nasional menunjukkan tren positif, tantangan pemulihan di tingkat daerah masih perlu mendapat perhatian khusus.

Setelah melalui masa-masa sulit akibat pandemi, Indonesia terus melanjutkan upaya pemulihan ekonominya pada tahun 2022. Berbagai kebijakan dan program yang telah dirancang sebelumnya mulai menunjukkan hasil yang positif, mendorong aktivitas ekonomi nasional ke arah yang lebih kuat. Pemerintah fokus mempercepat pemulihan dengan memperkuat program-program

strategis sejak awal tahun. Berbagai sektor yang sebelumnya terdampak mulai bergerak lebih dinamis, mencerminkan membaiknya kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. Meskipun pemulihan ini memberikan angin segar, tantangan global yang penuh ketidakpastian tetap menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, strategi berkelanjutan dan pengawasan ketat tetap diperlukan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat bertahan dan berkembang lebih stabil ke depannya.

Pada tahun 2023 ekonomi Indonesia menunjukkan kinerja yang cukup solid meskipun ada ketidakpastian global yang berlanjut. Kinerja positif ini ditopang oleh sektor-sektor utama yang selama ini menjadi andalan perekonomian nasional. Struktur ekonomi Indonesia secara umum tetap stabil, dengan kekuatan utama bertumpu pada sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan konstruksi. Aktivitas produksi yang terus bergerak dinamis menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, indikator sektor manufaktur juga menunjukkan penguatan, menandakan adanya peningkatan kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi nasional. Dengan landasan tersebut, Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah tantangan global.

Tahun 2024 menjadi periode transisi yang penuh dinamika, seiring dengan perubahan arah kepemimpinan nasional pasca Pemilu 2024. Ekspektasi pasar terhadap pemerintahan baru memberikan sentimen positif sekaligus kehati-hatian terhadap berbagai agenda kebijakan ekonomi yang akan ditempuh. Di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang terus berproses, Indonesia mulai menunjukkan indikator perbaikan struktural, seperti peningkatan investasi langsung, akselerasi transformasi digital, serta penguatan ekonomi hijau dan inklusif. Sektor-sektor berbasis teknologi dan ekonomi kreatif tumbuh signifikan, mencerminkan pergeseran orientasi ekonomi menuju sektor bernilai tambah tinggi. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga stabilitas harga di tengah tekanan inflasi global dan fluktuasi harga komoditas. Isu ketahanan pangan dan energi menjadi perhatian utama, bersamaan dengan kebutuhan mempercepat reformasi birokrasi dan daya saing tenaga kerja. Pemerintah berupaya mengakselerasi reformasi struktural melalui harmonisasi

kebijakan fiskal, perbankan, dan sektor riil untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Tahun 2024 pun menjadi penentu arah baru pembangunan ekonomi nasional dalam menghadapi era pasca-pandemi dan disrupsi global yang terus berkembang.

Tabel 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi (%) Tahun 2018-2024

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	4,61	4,14	-0,37	2,81	4,21	4,23	4,66
Sumatera Utara	5,18	5,22	-1,07	2,61	4,73	5,01	5,03
Sumatera Barat	5,14	5,01	-1,61	3,29	4,36	4,62	4,36
Riau	2,35	2,81	-1,13	3,36	4,55	4,21	3,52
Jambi	4,69	4,35	-0,51	3,7	5,12	4,67	4,51
Sumatera Selatan	6,01	5,69	-0,11	3,58	5,24	5,08	5,03
Bengkulu	4,97	4,94	-0,02	3,27	4,31	4,28	4,62
Lampung	5,23	5,26	-1,66	2,77	4,28	4,55	4,57
Kepulauan Bangka Belitung	4,45	3,32	-2,29	5,05	4,4	4,38	0,77
Kepulauan Riau	4,47	4,83	-3,8	3,43	5,06	5,16	5,02
DKI Jakarta	6,11	5,82	-2,39	3,55	5,25	4,96	4,9
Jawa Barat	5,65	5,02	-2,52	3,74	5,45	5	4,95
Jawa Tengah	5,3	5,36	-2,65	3,33	5,31	4,97	4,95
DI Yogyakarta	6,2	6,59	-2,67	5,58	5,15	5,07	5,03
Jawa Timur	5,47	5,53	-2,33	3,56	5,34	4,95	4,93
Banten	5,77	5,26	-3,39	4,49	5,03	4,81	4,79
Bali	6,31	5,6	-9,34	-2,46	4,84	5,71	5,48
Nusa Tenggara Barat	-4,5	3,9	-0,62	2,3	6,95	1,8	5,3
Nusa Tenggara Timur	5,11	5,25	-0,84	2,52	3,08	3,47	3,73
Kalimantan Barat	5,07	5,09	-1,82	4,8	5,07	4,46	4,9
Kalimantan Tengah	5,61	6,12	-1,41	3,59	6,45	4,14	4,46
Kalimantan Selatan	5,08	4,09	-1,82	3,48	5,11	4,84	5,05
Kalimantan Timur	2,64	4,7	-2,9	2,55	4,48	6,22	6,17
Kalimantan Utara	5,36	6,89	-1,09	3,99	5,32	4,94	4,57
Sulawesi Utara	6	5,65	-0,99	4,16	5,42	5,48	5,39
Sulawesi Tengah	20,56	8,83	4,86	11,68	15,22	11,91	9,89
Sulawesi Selatan	7,04	6,91	-0,71	4,64	5,1	4,51	5,02
Sulawesi Tenggara	6,4	6,5	-0,65	4,1	5,53	5,35	5,4
Gorontalo	6,49	6,4	-0,02	2,4	4,03	4,5	4,13
Sulawesi Barat	6,26	5,56	-2,34	2,57	2,26	5,23	4,76
Maluku	5,91	5,41	-0,91	3,63	5,31	5,21	5,34
Maluku Utara	7,86	6,25	5,39	16,79	22,94	20,49	13,73
Papua Barat	6,25	2,66	-0,76	-0,51	2,03	5,18	20,8
Papua	7,32	-15,74	-	-	-	1,82	3,6

Sumber: Publikasi Laporan Perekonomian Indonesia 2020-2024 , BPS.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia secara umum menunjukkan pola yang fluktuatif dari tahun ke tahun, dengan kecenderungan mengalami penurunan dan kenaikan yang tidak merata antarwilayah. Fluktuasi ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi masing-masing daerah, terutama dari sisi potensi sumber daya dan jenis aktivitas ekonomi yang mendominasi wilayah tersebut. Setiap daerah di Indonesia memiliki sektor unggulan yang berbeda, seperti pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, atau pariwisata. Oleh karena itu, dinamika pertumbuhan ekonomi tidak bisa disamaratakan, karena sangat dipengaruhi oleh kekuatan sektor lokal dan respon pemerintah daerah dalam mengelola potensi tersebut.

Pada tahun 2018, Provinsi Sulawesi Tengah tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan angka mencapai 20,56 persen poin, yang menunjukkan keberhasilan wilayah tersebut dalam mengelola sektor unggulannya, terutama sektor tambang dan energi. Provinsi Maluku Utara menyusul di posisi kedua dengan pertumbuhan sebesar 7,86 persen poin, bahkan mampu melampaui pertumbuhan provinsi-provinsi utama di Pulau Jawa yang selama ini dikenal sebagai pusat perekonomian nasional. Sementara itu, Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatatkan pertumbuhan ekonomi terendah dengan angka minus 4,5 persen poin, yang menunjukkan adanya kontraksi ekonomi yang cukup signifikan, bisa jadi akibat penurunan sektor pertambangan atau gangguan bencana alam.

Pada tahun 2024, pergeseran pertumbuhan kembali terjadi. Provinsi Papua Barat menempati posisi tertinggi dengan tingkat pertumbuhan sebesar 20,8 persen poin, disusul oleh Maluku Utara dengan angka 13,73 persen poin. Angka ini kembali menegaskan bahwa wilayah timur Indonesia mulai menunjukkan daya saing ekonomi yang kuat, terutama melalui hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur yang intensif. Sementara itu, Kepulauan Bangka Belitung mencatat pertumbuhan paling rendah dengan hanya 0,7 persen poin. Angka ini mencerminkan perlunya penguatan sektor-sektor ekonomi strategis dan peningkatan investasi di wilayah tersebut agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal.

Perbedaan yang mencolok antarprovinsi ini menunjukkan pentingnya perencanaan pembangunan daerah yang berbasis potensi lokal dan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerataan pembangunan menjadi hal yang krusial untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia

Tabel 4.4 Kontribusi Ekonomi Menurut Provinsi (%) Tahun 2018-2024

Provinsi	Kontribusi Ekonomi (%)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	1,04	1,02	1,06	1,09	1,1	1,11	1,1
Sumatera Utara	4,95	4,99	5,15	5,07	4,99	5,12	5,21
Sumatera Barat	1,54	1,53	1,53	1,49	1,49	1,52	1,51
Riau	5,02	4,74	4,62	4,95	5,18	5	5,05
Jambi	1,39	1,35	1,3	1,37	1,45	1,43	1,47
Sumatera Selatan	2,8	2,83	2,88	2,91	3,08	3,06	3,02
Bengkulu	0,44	0,45	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Lampung	2,22	2,22	2,24	2,19	2,16	2,19	2,2
Kepulauan Bangka Belitung	0,49	0,47	0,48	0,51	0,5	0,5	0,49
Kepulauan Riau	1,66	1,67	1,61	1,63	1,61	1,62	1,6
DKI Jakarta	17,31	17,55	17,55	17,18	16,65	16,77	16,71
Jawa Barat	13,09	13,24	13,21	13,01	12,66	12,79	12,82
Jawa Tengah	8,47	8,48	8,55	8,38	8,14	8,26	8,25
DI Yogyakarta	0,87	0,88	0,88	0,88	0,87	0,88	0,88
Jawa Timur	14,61	14,62	14,59	14,48	14,27	14,39	14,39
Banten	4,1	4,12	3,97	3,93	3,9	3,97	3,97
Bali	1,56	1,57	1,42	1,3	1,28	1,34	1,36
Nusa Tenggara Barat	0,83	0,83	0,85	0,83	0,82	0,81	0,83
Nusa Tenggara Timur	0,66	0,67	0,68	0,65	0,62	0,63	0,62
Kalimantan Barat	1,3	1,32	1,36	1,36	1,34	1,34	1,36
Kalimantan Tengah	0,93	0,94	0,97	1	1,04	1,02	1,01
Kalimantan Selatan	1,15	1,13	1,14	1,17	1,31	1,31	1,3
Kalimantan Timur	4,24	4,07	3,86	4,11	4,81	4,11	3,9
Kalimantan Utara	0,57	0,6	0,64	0,66	0,72	0,72	0,67
Sulawesi Utara	0,8	0,81	0,84	0,84	0,82	0,84	0,85
Sulawesi Tengah	1,12	1,16	1,25	1,46	1,69	1,69	1,71
Sulawesi Selatan	3,08	3,14	3,2	3,21	3,16	3,18	3,16
Sulawesi Tenggara	0,79	0,81	0,83	0,82	0,83	0,86	0,86
Gorontalo	0,25	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25
Sulawesi Barat	0,29	0,29	0,29	0,3	0,28	0,29	0,29
Maluku	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28
Maluku Utara	0,24	0,25	0,27	0,31	0,37	0,41	0,43
Papua Barat	0,53	0,53	0,53	0,5	0,48	0,3	0,35
Papua	1,41	1,18	-	-	-	0,18	0,17

Sumber: Publikasi Laporan Perekonomian Indonesia 2018 -2024 , BPS.

Tingkat kontribusi ekonomi suatu wilayah menunjukkan besarnya peran suatu sector atau wilayah terhadap total output ekonomi. Dari tahun 2018-2024 DKI Jakarta dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan tingkat kontribusi ekonomi tertinggi pada angka 17,31 poin untuk DKI Jakarta dan 14,61 untuk Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa dua wilayah tersebut merupakan penggerak utama ekonomi di Indonesia. Namun, tingkat pertumbuhan ekonominya relatif moderat mencerminkan kondisi ekonomi yang sudah mapan dan stabil. Dan provinsi dengan angka terendah 0,25 adalah Gorontalo.